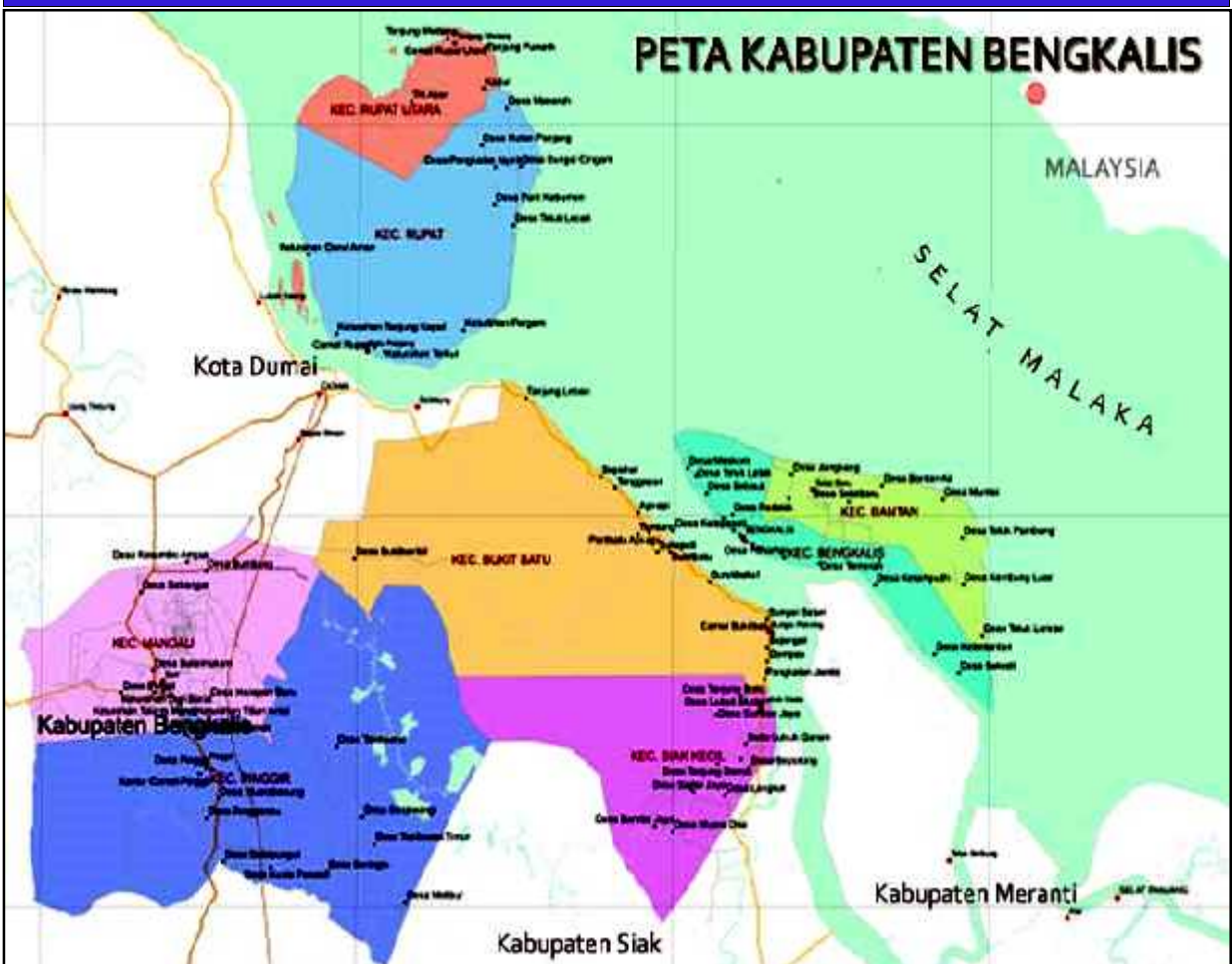


RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK TAHUN 2021**



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 telah selesai dilaksanakan.

Renja PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan tahunan yang disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dijelaskan tentang penyelenggaraan kewenangan Urusan Pemerintahan Konkruen (UPK) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menjelaskan tentang kewenangan penyelenggaraan Urusan/Sub Urusan berdasarkan Perangkat Daerah, Layanan Utama dan Fungsi Dasar. Pada dokumen Renja PD ini juga terdapat hasil pemetaan Renja PD Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Renja ini mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis. Diharapkan nantinya Renja 2021 dapat menjadi dasar penyusunan program/kegiatan Tahun 2021 untuk mendukung mewujudkan pencapaian Visi dan Misi daerah, Visi dan Misi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan dokumen Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

Bengkalis, Januari 2020



**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS**

Drs. JOHANSYAH SYAFRI
Pembina Tk I
NIP. 19680411 199303 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Sisrenbangnas), setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang (RPJPD), perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD).

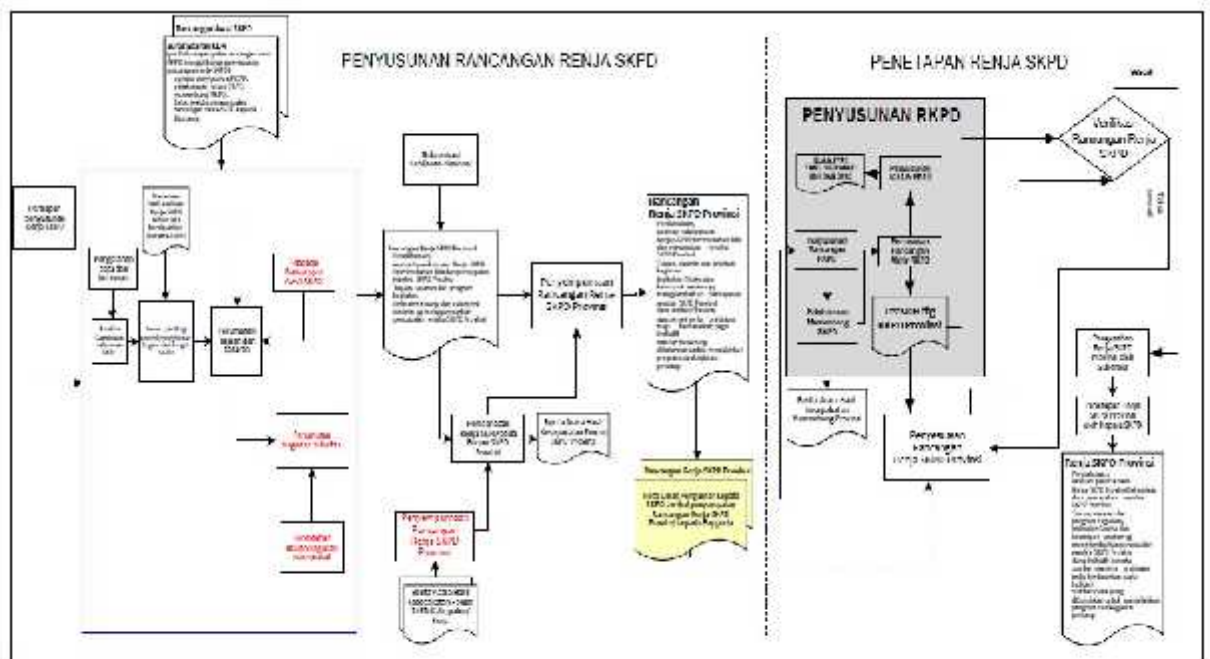
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun, serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Secara hirarki penyusunan rancangan Renja PD merupakan penjabaran dari Rancangan awal RKPD yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD tersebut. Renja PD juga diselaraskan dengan Renstra PD yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan PD. Renja PD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang di paduserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan, Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara teknis,

Renja PD akan menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran).

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdapat empat tahapan utama dalam Penyusunan Renja PD yakni: persiapan penyusunan Renja PD, tahap penyusunan rancangan Renja, Pelaksanaan forum PD dan tahap penetapan Renja PD.

Sedangkan Tahapan dalam penyusunan Renja PD sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 melalui beberapa tahapan, yaitu: Penyusunan Rancangan Awal, Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan Rencana Kerja. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tahapan penyusunan Renja PD terlihat seperti gambar berikut ini:



Kemudian didalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJDP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan Renja Pemerintah Daerah bahwa Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Adapun penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi dari Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2021, melakukan inventarisir permasalahan dari hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya (evaluasi Renja tahun 2017) dan memperhatikan kondisi eksisting (Renja 2020) dengan berpedoman kepada Rancangan Awal Renja PD 2020 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Periode 2017-2021.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 4 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis. Sebagai PD yang baru terbentuk tentunya terdapat kekurangan disana sini seperti sumber daya manusia aparatur yang terbatas, minimnya sarana dan prasarana kantor, belum tersedianya dokumen perencanaan yang baik, dan rendahnya pendanaan. Dibentuknya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ini belum mempunyai Renstra dan Renja sementara RPJMD sudah berjalan pada tahun kedua, sehingga hal ini menyebabkan terdapatnya beberapa program dan kegiatan yang kurang sesuai, dan tidak tepatnya antara target dengan kegiatan, dan kurang terarahnya arah, tujuan dan indikator kinerja.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021, dan mengacu pada RPJMD tema pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2021 adalah "Percepatan Pembangunan Wilayah Cepat Tumbuh" sedangkan prioritas pembangunan diarahkan kepada: pengembangan infrastruktur pendukung empat gerbang; intensifikasi produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan pendukung ekonomi masyarakat; pengembangan kualitas pendidikan dan kesehatan; peningkatan keserasian pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan; peningkatan kualitas

berusaha masyarakat dan peningkatan kualitas pencari kerja dan pekerja tempatan, penguatan kehidupan beragama dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka mensukseskan pemilihan umum dan pemilihan presiden:

- 1) pengembangan infrastruktur pendukung empat gerbang;
- 2) intensifikasi produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan pendukung ekonomi masyarakat;
- 3) pengembangan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- 4) peningkatan keserasian pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan;
- 5) peningkatan kualitas berusaha masyarakat dan peningkatan kualitas pencari kerja dan pekerja tempatan; dan
- 6) penguatan kehidupan beragama dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka mensukseskan pemilihan umum dan pemilihan presiden.

Renja PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2021 ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pada tahap berikutnya RKA tersebut akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang ditetapkan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2021 yaitu, Visi:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Informatif, Integratif dan Inovatif “

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tersebut di atas yaitu:

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Informatif, adalah karakteristik penyelenggaraan pemerintahan yang berpengetahuan, memiliki kemudahan untuk mengakses, memanfaatkan serta menyebarkan informasi tentang program dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat melalui media massa, media baru, dan media/lembaga komunikasi masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pengembangan kemitraan berbagai media untuk publikasi potensi dan promosi daerah dengan mendayagunakan informasi bagi tercapainya nilai tambah kehidupan masyarakat.

2. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Integratif, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terintegrasi melalui penyediaan sarana prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), penyediaan informasi, data, pengamanan informasi/data dan sistem informasi/aplikasi terpadu.
3. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berkemajuan melalui pengembangan dan implementasi TIK menuju *e-Government* dan *Smart City*.

Rumusan misi yang terkandung dari visi tersebut di atas yaitu: Mewujudkan implementasi TIK didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menuju *e-Government* dan *Smart City*.

Renja PD Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tahun 2021 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Berikut landasan hukum penyusunan Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis tahun 2021:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014–2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja, Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta

Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis; dan
16. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/409/2019 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan penyusunan Renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan dan terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan komunikasi dan informatika pada tahun 2021. Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja PD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis adalah sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2021 bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkalis. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun Anggaran 2021 ini mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Evaluasi adalah interpretasi atau penafsiran yang bersumber pada data kuantitatif, sedang data kuantitatif merupakan hasil dari pengukuran. Proses evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri. Walaupun tidak selalu sama, tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Berikut ini dipaparkan salah satu tahapan evaluasi yang sifatnya umum digunakan.

- **Menentukan apa yang akan dievaluasi.**

Dalam bidang apapun, apa saja yang dapat dievaluasi, dapat mengacu pada suatu program kerja. Di sana banyak terdapat aspek-aspek yang sekiranya dapat dan perlu dievaluasi. Tetapi, umumnya yang diprioritaskan untuk dievaluasi adalah hal-hal yang menjadi *key-success factors*-nya

- **Merancang (desain) kegiatan evaluasi.**

Sebelum evaluasi dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu desain evaluasinya agar data apa saja yang dibutuhkan, tahapan-tahapan kerja apa saja yang dilalui, siapa saja yang akan dilibatkan, serta apa saja yang akan dihasilkan menjadi jelas.

- **Pengumpulan data.**

Berdasarkan desain yang telah disiapkan, pengumpulan data dapat dilakukan secara efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

- **Pengolahan dan analisis data.**

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk dikelompokkan agar mudah dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis yang sesuai, sehingga dapat menghasilkan fakta yang dapat dipercaya. Selanjutnya, dibandingkan antara fakta dan harapan/rencana apakah telah sesuai dengan tolok ukur tertentu sebagai hasil evaluasinya.

- **Pelaporan hasil evaluasi.**

Agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hendaknya hasil evaluasi didokumentasikan secara tertulis. Tahun 2019 untuk pelaksanaan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp21.744.828.653,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp6.653.659.169,00 dan Belanja Langsung Rp15.091.169.484,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp19.460.049.097,00 atau 89,49% terdiri atas realisasi BTL sebesar Rp5.415.185.182,00 dan realisasi BL sebesar Rp14.044.863.915,00 dengan realisasi fisik keseluruhan 99,15%. Adapun program dan kegiatan yang terdapat pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 yang telah dilaksanakan dalam rangka Urusan Wajib di Bidang Komunikasi dan Informatika antara lain sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:

1. Penyediaan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
5. Penyediaan alat tulis kantor;
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
9. Penyediaan makanan dan minuman kantor;
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
11. Penyediaan jasa keamanan kantor;
12. Penyediaan jasa sopir kantor.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
2. Pengadaan peralatan gedung kantor;
3. Pengadaan mebeleur;
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
7. Pengadaan peralatan perangkat jaringan.

3) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur:

- Bimbingan teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:

- Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan perangkat daerah.

5) Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa:

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi;
2. Publikasi media informasi pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Penyediaan Langgan Jasa Internet;
4. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan Internet;
5. Pengelolaan program siaran radio;
6. Pengelolaan Media Center.

6) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi:

- Pembuatan Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

7) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi:

- a. Sosialisasi Desiminasi Informasi Pemerintah Daerah;
- b. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- c. Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID);
- d. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N;
- e. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika.

8) Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media:

- a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
- b. Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
- c. Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah pada Media Massa;

URUSAN STATISTIK

- Program dan kegiatan

Program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 yang telah dilaksanakan dalam rangka Urusan di Bidang Statistik antara lain sebagai berikut:

9) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah:

- Sinkronisasi dan integrasi data statistik dan informasi pembangunan daerah.

URUSAN PERSANDIAN

- Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 yang telah dilaksanakan dalam rangka Urusan Wajib di Bidang Persandian antara lain sebagai berikut:

10) Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah:

- Koordinasi/konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan Evaluasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 yang mempertimbangkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 merupakan Renja Tahun kedua dalam periode Renstra 2017-2021, maka berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010, pengisian Tabel II.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis s/d tahun berjalan (2018) yang mencantumkan program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra-PD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

Tabel. 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis

Periode Pelaksanaan s/d 31 Desember 2019

NO	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (OutPut)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 s/d 2021)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2019 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2018)			
				Target	Realisasi	Target Renja PD Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
-	1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS															
		URUSAN : KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK													
		BELANJA LANGSUNG													
I	1.2.10.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Persentase Cakupan Layanan Akses Informasi	100	%	100	%	100	%	26	%	100	100	26	26
		Kegiatan :													
1	1.2.10.1.2.10.01.15.003	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pengembangan SDM Komunikasi dan informasi	60	orang	12	orang	0	orang	12	orang	100	12	36	60
2	1.2.10.1.2.10.01.15.005	Pengadaan Alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi yang tersedia	65	unit	13	unit	0	Unit	13	unit	100	0	26	40
3	1.2.10.1.2.10.01.15.010	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase permintaan informasi yang ditindaklanjuti	100	%	100	%	0	%	100	%	154	0	200	2
4	1.2.10.1.2.10.01.15.013	Penyediaan Langganan Jasa Internet	Jumlah bandwidth yang tersedia dalam setahun	700	MBPS	50	MBPS	100	MBPS	100	MBPS	100	100	250	34

5	1.2.10.1.2.10.01.15.015	Penertiban spanduk, survey dan monitoring tower warponsel dan warnet	Frekuensi dilakukannya penertiban spanduk, survey, dan monitoring tower warponsel dan warnet	1	kegiatan	1	kegiatan	0	kegiatan	1	kegiatan	100	0	1	100
6	1.2.10.1.2.10.01.15.016	Pelaksanaan hari-hari besar nasional	Jumlah pelaksanaan hari besar nasional yang dilakukan	10	Acara	2	acara	1	acara	1	acara	100	1	4	40
7	1.2.10.1.2.10.01.15.021	Penyediaan Informasi melalui radio pemerintah daerah	Memberikan informasi kepada masyarakat melalui siaran radio	5	tahun	0,8	tahun	0	tahun	0,8	tahun	80	0	0,8	16
8	1.2.10.1.2.10.01.15.023	Publikasi Media Informasi Pemerintah Daerah Kab.Bengkalis	Menyediakan media informasi melalui media informasi pemerintah daerah	24	item	1	tahun	6	tahun	7	tahun	100	2	10	42
9	1.2.10.1.2.10.01.15.029	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika	Keikutsertaan Kabupaten Bengkalis pada temu BAKOHUMAS dan komunitas tingkat Provinsi dan Nasional.	5	kegiatan	1	kegiatan	1	kegiatan	2	kegiatan	100	1	4	80
10	1.2.10.1.2.10.01.15.031	Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Internet	Beroperasinya titik wifi dan jaringan internet dengan baik	52	titik	0	titik	13	Titik	13	titik	0	10	23	44
11	1.2.10.1.2.10.01.15.033	Pengembangan dan pembuatan Website	Jumlah/jenis aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan	10	aplikasi/sistem informasi	1	aplikasi/sistem informasi	1	aplikasi/sistem informasi	2	aplikasi/sistem informasi	100	0	3	30
12	1.2.10.1.2.10.01.15.035	Pengelolaan Program Siaran Radio	Cakupan beroperasinya Radio Pemerintah Daerah	5	Tahun	1	tahun	0	tahun	1	tahun	100	0	1	20
13	1.2.10.1.2.10.01.15.037	Pengelolaan Konten Digital Signage	Jumlah konten digital signage yang dikelola/dibuat dalam setahun	11	Konten	0	konten	2	0	2	konten	0	2	2	18
14	1.2.10.1.2.10.01.15.038	Pembinaan/pemeliharaan dan pelayanan pengolahan data elektronik	Persentase Pelayanan pengolahan data elektronik dalam setahun.	5	tahun	1	tahun	0	tahun	1	tahun	100	0	1	20
15	1.2.10.1.2.10.01.15.040	Penguatan dan Pengembangan Media Center	Jumlah informasi/kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang disebarluaskan melalui Media Center	3200	informasi	0	informasi	800	0	800	informasi	0	1200	2000	62,5
16	1.2.10.1.2.10.01.15.043	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Standar Mutu Pelayanan LPSE yang memenuhi sertifikasi	17	standar	1	standar	5	standar	6	standar	100	5	6	35
II	1.2.10.16	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Persentase regulasi daerah terhadap penyelenggaraan tata kelola TIK	100	%	1	-	0	aplikasi	25	-	100	0	25	25
		Kegiatan :				1				1					
17	1.2.10.1.2.10.01.16.001	Pembuatan Rencana Induk Pengembangan e-Government Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi/website yang dibuat	1	aplikasi	1	aplikasi	0	aplikasi	1	aplikasi	100	1	1	100

18	1.2.10.1.2.10.01.16.002	Perencanaan Blue Print E-Government Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Jumlah dokumen perencanaan blue print e-Government Pemerintah Kabupaten Bengkalis	3	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	0	0	0
III	1.2.10.17	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Persentase layanan informasi yang ditindaklanjuti	100	%	0	%	100	%	23	%	0	100	23	23
		Kegiatan :													
19	1.2.10.1.2.10.01.17.004	Sosialisasi Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Diseminasi Informasi Pemerintah	380	orang	0	orang	100	orang	100	orang	0	100	200	53
20	1.2.10.1.2.10.01.17.005	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Meningkatnya pemahaman peserta tentang Keterbukaan Informasi Publik	350	orang	0	orang	50	orang	50	orang	0	100	150	42,8
21	1.2.10.1.2.10.01.17.006	Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID)	Persentase permintaan informasi yang ditindaklanjuti ke PPID Pembantu	400	%	0	%	100	%	100	%	0	45	145	36,3
22	1.2.10.1.2.10.01.17.007	Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N	Persentase pengaduan online yang ditindaklanjuti ke Badan Publik	400	%	0	%	100	%	100	%	0	100	200	50
IV	1.2.10.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA	Persentase cakupan mass media yang melakukan kerjasama informasi	100	%	0	%	100	%	17	%	0	100	17	17
		Kegiatan :													
23	1.2.10.1.2.10.01.18.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.	Cakupan kecamatan yang menjadi lokasi penyebarluasan informasi setiap tahunnya	51	kecamatan	0	kecamatan	11	kecamatan	11	kecamatan	0	11	22	43
24	1.2.10.1.2.10.01.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Cakupan media massa yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan	115	media	0	media	0	media	0	media	0	0	0	0
25	1.2.10.1.2.10.01.18.007	Peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah liputan dan pendokumentasian yang dilakukan dalam setahun	140	kali	0	kali	35	kali	35	kali	0	70	105	75
26	1.2.10.1.2.10.01.18.008	Publikasi Kebijakan dan kegiatan Pemerintah pada Media Massa	Jumlah media massa yang melakukan kerjasama sesuai dengan peraturan	375	media	0	media	75	media	75	media	0	100	175	46,6
27	1.2.10.1.2.10.01.18.009	Penayangan Dialog Interaktif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada Televisi dan radio	Jumlah dialog interaktif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada televisi/radio	8	kali	0	kali	0	kali	0	kali	0	0	0	0

28	1.2.10.1.2.10.01.18.010	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dikembangkan/diberdayakan	10	KIM	0	KIM	1	KIM	2	KIM	0	0	2	20
V	1.2.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase capaian nilai evaluasi SAKIP Diskominfotik	100	%	0	%	100	%	21	%	0	100	21	21
		Kegiatan :				0				0					
29	1.2.10.1.2.10.01.06.027	Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program kegiatan SKPD	14	dokumen	0	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	0	4	7	50
		Kegiatan :				0				0					
VI	1.2.14.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Persentase integrasi data statistik sektoral	100	%	0	%	25	%	-	%	0	25	-	0
		Kegiatan :				0				0					
30	1.2.14.1.2.14.01.15.012	Sinkronisasi dan integrasi Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan statistik sektoral berkualitas dan terintegrasi pada portal data	100	%	0	%	25	%	25	%	100	50	50	50
VII	1.2.15.15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengaman informasi milik pemerintah daerah	100	%	0	%	100	%	31	%	0	100	31	24
33	1.2.15.1.2.15.01.15.003	Koordinasi/konsultasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	200	%	0	%	25	%	25	%	100	50	75	37,5
VIII	1.2.10.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase aparatur yang mengikuti bimtek berdasarkan tupoksi	100	%	0	%	100	%	26	%	0	100	26	37
		Kegiatan :				0				0					
34	3.0.1.1.2.10.01.05.155	Bimbingan teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Aparatur yang mengikuti bimtek bidang Teknologi Informasi Komunikasi	23	orang	4	orang	5	orang	5	orang	100	5	14	60,8
35	3.0.1.1.2.10.01.05.126	Pendidikan dan Pelatihan informal	Meningkatnya pengetahuan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal/informal	52	orang	12	orang	12	orang	12	orang	100	0	24	46
IX	1.2.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100	%	24	%	100	%	78	%	24	100	78	78

		Kegiatan :													
37	3.0.1.1.2.10.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	45	item	0	item	14	item	14	item	0	15	29	64,4
38	3.0.1.1.2.10.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeler kantor	16	item	0	item	4	item	4	item	100	5	9	56,3
39	3.0.1.1.2.10.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan terpeliharanya bangunan gedung kantor	12	unit	2	unit	2	unit	2	unit	100	2	6	50
40	3.0.1.1.2.10.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Cakupan kendaraan dinas yang berfungsi dengan baik	500	%	100	%	100	%	100	%	0	100	300	60
41	3.0.1.1.2.10.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Cakupan peralatan gedung kantor yang berfungsi dengan baik	500	%	100	%	100	%	100	%	50	100	300	60
42	3.0.1.1.2.10.01.02.198	Pengadaan Perlatan Perangkat Jaringan	Jumlah jenis peralatan perangkat jaringan yang disediakan	19	item	5	item	5	item	5	item	0	5	15	60
X	1.2.10.01	PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	100	%	100	%	100	%	32	%	100%	100	32	32
		Kegiatan :													
44	1.2.10.01.1.2.10.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase layanan surat menyurat yang dilayani	500	%	100	%	100	%	100	%	100	100	300	60
45	1.2.10.01.1.2.10.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor	500	%	100	%	100	%	100	%	100	100	300	60
46	1.2.10.01.1.2.10.01.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas yang memiliki izin	500	%	100	%	100	%	100	%	100	100	300	60
47	1.2.10.01.1.2.10.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan terciptanya lingkungan kantor yang bersih	27	orang	5	orang	5	orang	5	orang	100	5	15	55,5
48	1.2.10.01.1.2.10.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	500	%	100	%	100	%	100	%	100	100	300	60
49	1.2.10.01.1.2.10.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	500	%	100	%	100	%	100	%	100	100	300	60
50	1.2.10.01.1.2.10.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	Cakupan terpenuhinya penerangan bangunan kantor	500	%	100	%	100	%	100	%	100	100	300	60
51	1.2.10.01.1.2.10.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16	jenis	1	jenis	0	jenis	0	%	0	7	8	50

52	1.2.10.01.1.2.10.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan terpenuhinya makan minum rapat dan kegiatan kantor	500	%	100	%	100	%	100	%	100	100	300	60
53	1.2.10.01.1.2.10.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase terpenuhinya keperluan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	500	%	100	%	100	%	100	%	100	100	300	60
54	1.2.10.01.1.2.10.01.01.019	Penyediaan jasa keamanan kantor	Cakupan terciptanya lingkungan kantor yang aman	32	orang	8	orang	6	orang	6	orang	100	6	20	62,5
55	1.2.10.01.1.2.10.01.01.033	Penyediaan Jasa sopir kantor	Cakupan terpenuhinya kebutuhan jasa supir kantor	8	orang	0	orang	2	orang	2	orang	100	2	4	50
56	1.2.10.01.1.2.10.01.01.050	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Cakupan desa yang memiliki website/sistem informasi	1	profil	0	profil	0	profil	0	profil	0	1	1	100
57	1.2.10.01.1.2.10.01.01.060	Koordinasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	200	persen	0	persen	20	persen	20	persen	100	35	55	28

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai Perangkat Daerah (PD) yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi berkewenangan melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektor dan Persandian dan Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan daerah.

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi PD yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang berkualitas melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan PD harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja PD kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal), karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016–2021. Adapun Tujuan dan sasaran RPJMD yang di dukung pencapaiannya oleh indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika.

NO	MISI/TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SASARAN	INDIKATOR TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Berwibawa, Transparan dan Bertanggung Jawab Serta dapat Melaksanakan Kepemimpinan dengan Bijak, Berani dan Ikhlas	1. Terimplementasinya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	1. Impelementasi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pada penyelenggaraan pemerintahan e-Government	1. Tersedianya/meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika 2. Tersedianya/cakupan bandwidth yang terintegrasi 3. Terbangunnya jaring informasi yang mendukung pelayanan public 4. Cakupan/jumlah aplikasi/ system informasi yang digunakan/dikembangkan	1. Persentase PD yang terintegrasi jaringan Fiber Optik (FO) 2. Persentase PD yang terintegrasi penyediaan bandwidthnya 3. Indeks Kepuasan Masyarakat
1.	Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah dan Sumberdaya Manusia untuk Kemakmuran Rakyat	1. Terselenggaranya pengelolaan dan pengembangan SDM dan Infrastruktur di bidang TIK, 2. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan data dan informasi pembangunan berbasis elektronik	1. Impelementasi Teknologi Informasi (TI) pada penyelenggaraan pemerintahan e-Government	1. Tersedianya/meningkatnya infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika 2. Tersedianya/cakupan bandwidth yang terintegrasi 3. Terbangunnya jaring informasi yang mendukung pelayanan public 4. Cakupan/jumlah aplikasi/ system informasi yang digunakan/dikembangkan	1. Persentase PD yang terintegrasi jaringan Fiber Optik (FO) 2. Persentase PD yang terintegrasi penyediaan bandwidthnya 3. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan 2017– 2021 dapat diuraikan dalam Tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun 2019.

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2021	
				(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis	rata-rata nasional (kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi) tahun 2016 adalah 85,016		-	75	80	87	80	82	87	92	Tahun 2019 nilai 82
2	Peringkat KI (Komisi Informasi) Riau Award Kabupaten Bengkalis	-		III	I	I	I	I	III	I	I	Kualitas Indikator: Nilai Indeks 40-59 (kurang informatif), 60-70 (cukup informatif), 71-79 (menuju informatif), 80-96 (merunut informatif), 97-100 (informatif)
3	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kabupaten Bengkalis	rata-rata nasional (juli 2019) adalah 1,98		-	1,8	2,5	3,2	1,8	- (1,8)	2,5	3,2	Indeks SPBE: 1-5 1 (rintisan) 2 (terkelola) 3 (terstandarisasi) 4 (terintegrasi dan terukur) 5 (optimum) Bobot Nilai Dimensi 1 (17%), Dimensi 2 (28%), Dimensi 3 (55%)
4	Persentase Perangkat Daerah dengan Statistik Sektoral terintegrasi di Portal Data	-		-	15	35	75	15	35	50	75	Jumlah PD adalah sebanyak 46
5	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	-		-	20	50	100	20	50	60	100	46 PD
6	Persentase kecamatan yang memiliki KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Jumlah kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)		-	-	2	3	-	2	3	6	Jumlah kecamatan adalah 11

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis telah melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD dan RPJMD.

A. Kebijakan pembangunan komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian:

1. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik dengan membangun koordinasi kepada seluruh PD menuju Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik-Laporan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!);
3. Melakukan diseminasi dan distribusi informasi melalui media kepada masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan pemerintah;
4. Melakukan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
5. Membangun sarana dan prasarana infrastruktur perangkat jaringan dan internet, meningkatkan kapasitas aparatur TI, pengembangan aplikasi dan integrasinya untuk mendukung pengembangan *e-Government*, *i-Government* dan pelayanan TI kepada masyarakat;
6. Menyusun Peraturan Bupati tata kelola TI di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
7. Menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) *e-Government* Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
8. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada seluruh PD untuk pengembangan dan penerapan *e-Office* ;
9. Membangun koordinasi, melakukan pengumpulan dan mengintegrasikan data statistik sektoral berbasis web kepada seluruh PD serta melakukan kerjasama analisis data melalui rekomendasi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bahan masukan dan kebijakan pembangunan;

10. Memfasilitasi pengamanan informasi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian;

B. Permasalahan dan hambatan:

1. rendahnya koordinasi dan layanan informasi dan dokumentasi melalui PPID antara PPID Utama dan PPID Pembantu dan rendahnya koordinasi layanan pengaduan online masyarakat melalui SP4N LAPOR! oleh Badan Publik;
2. rendahnya pemahaman aparatur dan komitmen pimpinan PD terhadap Keterbukaan Informasi Publik, kelengkapan data/informasi pada Daftar Informasi Publik (DIP) pada PPID Pembantu;
3. rendahnya pembinaan dan partisipasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) terhadap diseminasi dan distribusi informasi serta untuk menangkal berita hoaks;
4. rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perangkat jaringan dan internet;
5. belum optimalnya pengembangan dan penerapan TIK dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat;
6. rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur TI, pengembangan aplikasi dan integrasinya untuk mendukung pengembangan *e-Government, i-Government*;
7. rendahnya partisipasi PD sebagai penyedia data statistik sektoral untuk mewujudkan statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi;
8. rendahnya pemahaman aparatur dan pimpinan PD terhadap pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian sehingga menyebabkan lambannya upaya fasilitasi daerah melalui pendampingan provinsi dalam rangka pengamanan informasi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian;
9. kurangnya/rendahnya aparatur dan kapasitas dan kompetensi aparatur Bidang Statistik dan persandian;
10. belum adanya aparatur pejabat fungsional di Bidang Statistik dan Persandian; dan

11. kurangnya/rendahnya dukungan penganggaran terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah, layanan utama dan fungsi dasar di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

C. Isu-isu penting yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2017-2021 antara lain:

1. kesenjangan kualitas pelayanan dan ketersediaan informasi terhadap laju perkembangan global serta semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan pelayanan informasi yang semakin terbuka, cepat, mudah dan murah;
2. kesenjangan pengembangan dan penerapan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat baik antar pemerintah kabupaten/kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau maupun nasional;
3. semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi sebagai bahan dan pertimbangan kebijakan perencanaan pembangunan; dan
4. semakin tingginya perkembangan TI global yang secara beriringan semakin tinggi pula tingkat kejahatan TI (cyber crime) sehingga menuntut upaya untuk meningkatkan pengamanan informasi pemerintah daerah.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada PD dalam menyusun rancangan Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Tabel 2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Bengkalis

PD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG				6.000.000.000,00						
	BELANJA LANGSUNG				23.707.351.000,00						
	NON URUSAN				10.395.800.000,00						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Bengkalis	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	100%	2.252.260.000,00						
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bengkalis	Capaian terselenggaranya layanan administrasi umum dan kepegawaian	100%, 10 orang	10.000.000,00						
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan listrik	Kab. Bengkalis	Capaian terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan	190.000.000,00						
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bengkalis	Capaian pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang di urus	6 Unit	20.000.000,00						
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Bengkalis	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	28 item, 6 orang	158.600.000,00						
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Bengkalis	Capaian terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	35 Item	185.000.000,00						
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bengkalis	Capaian terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	9 Item	50.000.000,00							
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bengkalis	Capaian terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi dan peralatan listrik kantor	16 Item	68.500.000,00							
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bengkalis	Jumlah jenis bahan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	15.000.000,00							

9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Bengkulu	Capaian terpenuhinya makanan dan minuman kantor	1 Tahun	86.960.000,00					
10.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Kab. Bengkulu	Capaian terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun	1.100.000.000,00					
11.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kab. Bengkulu	Capaian terwujudnya lingkungan kerja yang aman	6 Orang	145.000.000,00					
12.	Penyediaan Jasa Sopir kantor	Kab. Bengkulu	Jumlah tenaga supir yang tersedia	2 orang	38.400.000,00					
13.	Penyediaan jasa tenaga administrasi	Kab. Bengkulu	Jumlah tenaga administrasi yang tersedia	10 orang	184.800.000,00					
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dikelola baik	100%	7.183.540.000,00					
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Bengkulu	Jumlah perlengkapan kantor yang bertambah dalam laporan barang/asset	2 item	150.000.000,00					
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kab. Bengkulu	Jumlah peralatan kantor yang bertambah dalam laporan barang/asset	8 item	678.540.000,00					
3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kab. Bengkulu	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang terlaksana	21 unit	2.110.000.000,00					
4	Pengadaan meubeler	Kab. Bengkulu	Jumlah meubeler yang bertambah dalam laporan barang/asset	8 item	120.000.000,00					
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Kab. Bengkulu	Cakupan bangunan gedung kantor dalam kondisi baik	4 unit	1.000.000.000,00					
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab. Bengkulu	Persentase kendaraan dinas/operasional dengan kondisi laik jalan	100%	260.000.000,00					
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Bengkulu	Persentase peralatan gedung kantor dengan kondisi baik	100%	165.000.000,00					
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana e-Government dan Smart City	Kab. Bengkulu	Tingkat capaian dimensi infrastruktur	12 Item	2.700.000.000,00					

III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase meningkatnya kapasitas aparatur peserta bimtek di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	100%	625.000.000,00						
1.	Bimbingan teknis Teknologi Informasi dan komunikasi	Kab. Bengkulu	Jumlah modul bimbingan teknis TIK yang diikuti	3 modul	225.000.000,00						
2	Pendidikan dan pelatihan formal/informal	Kab. Bengkulu	Cakupan aparatur peserta diklat yang meningkat pemahamannya	20 orang	400.000.000,00						
IV	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kab. Bengkulu	Predikat akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	335.000.000,00						
1.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	B	175.000.000,00						
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	Persentase aset yang tercatat dan dilaporkan status assetnya	100%	50.000.000,00						
3	Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	Persentase dokumen renstra yang tersusun	100%	110.000.000,00						
V	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.533.570.000,00						
	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa		Capaian Indeks PeGI (Pemerintahan e-Government Indonesia)	2,4	6.196.068.000,00						
1	Publikasi media Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu	Kab. Bengkulu	Jumlah media informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasi	1 Tahun	500.000.000,00						
2	Penyediaan langganan jasa internet	Kab. Bengkulu	Rata-rata kecepatan transfer data internet	1 Tahun	3.620.072.000,00						
3	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet	Kab. Bengkulu	Jumlah <i>free public hotspot area</i> yang berfungsi baik	1 Tahun	639.204.000,00						

4	Pengelolaan Media Center	Kab. Bengkalis	Jumlah informasi publik/kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang disebarluaskan	14 Item	513.370.000,00					
5	Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	Kab. Bengkalis	Persentase menara telekomunikasi yang memenuhi standar operasi	11 Kecamatan	188.672.000,00					
6	Pengembangan dan pembuatan aplikasi	Kab. Bengkalis	Tingkat capaian dimensi aplikasi	2	300.000.000,00					
7	Pembuatan dan Penayangan Profil Pembangunan Daerah	Kab. Bengkalis	Jumlah profil pembangunan daerah yang didokumentasikan	2 Profil	434.750.000,00					
VI	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkalis	100%	2.550.000.000,00					
1	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Kab. Bengkalis	Jumlah peserta sosialisasi KIP yang meningkatkan pemahamannya tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Kegiatan	600.000.000,00					
2	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Kab. Bengkalis	Persentase permintaan informasi dan dokumentasi yang ditindaklanjuti PPIID Utama ke Badan Publik	1 Tahun	750.000.000,00					
3	Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N	Kab. Bengkalis	Persentase pengaduan online melalui LAPOR! SP4N yang ditanggapi Badan Publik	94 Orang	600.000.000,00					
4	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kab. Bengkalis	Persentase kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	3 Kecamatan	250.000.000,00					
5	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika	Kab. Bengkalis	Jumlah Rakortek BAKOHUMAS/ Komunitas Tingkat Nasional yang diikuti	1 Kali	175.000.000,00					
6	Pelaksanaan Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah	Kab. Bengkalis	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Diseminasi dan Distribusi Informasi Nasional	5 Media	175.000.000,00					
VII	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Kab. Bengkalis	Persentase Cakupan Mass Media yang melakukan kerjasama	100%	3.787.502.000,00					

1.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Kab. Bengkulu	Jumlah kecamatan yang menjadi lokasi penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	1 Tahun	253.600.000,00					
2.	Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Kab. Bengkulu	Jumlah peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilakukan	1 Tahun	651.402.000,00					
3.	Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintahan pada Media Massa	Kab. Bengkulu	Jumlah mass media yang melakukan kerjasama publikasi advetorial kebijakan dan kegiatan Pemerintah	1 Tahun	2.882.500.000,00					
URUSAN STATISTIK										
VIII	Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Kab. Bengkulu	Persentase PD dengan Statistik Sektoral berkualitas dan terintegrasi pada Portal Data	75%	375.000.000,00					
1.	Sinkronisasi dan Integrasi Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah	Kab. Bengkulu	Persentase PD dengan statistik sektoral berkualitas dan terintegrasi pada portal data	1 Tahun	375.000.000,00					
URUSAN PERSANDIAN										
IX	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah	Kab. Bengkulu	Jumlah maksimal kejadian penerobosan pengamanan informasi Pemerintah Daerah dalam setahun	3	402.981.000,00					
1	Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah	Kab. Bengkulu	Jumlah aparatur yang difasilitasi sebagai peserta diklat teknis Persandian	1 Tahun	75.000.000,00					
2	Koordinasi/konsultasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Bengkulu	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	1 Tahun	225.000.000,00					
3	penyelenggaraan kontra penginderaan untuk pengamanan informasi pimpinan di Pemerintah Daerah	Kab. Bengkulu	Jumlah aparatur yang memahami pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian	1 Kegiatan	102.981.000,00					

	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	23.707.351.000,00		19.914.400.982,00	
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.000.000.000,00		5.315.045.860,80	
	JUMLAH BL + BTL	29.707.351.000,00		25.229.446.842,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Selain musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) salah satu mekanisme perencanaan pembangunan adalah forum konsultasi publik. Melalui forum konsultasi publik diharapkan mendapatkan masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsultasi dilaksanakan secara terbuka dengan mengundang para pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur kelompok masyarakat, perguruan tinggi, LSM, Perangkat Daerah maupun lembaga/institusi lainnya untuk menjaring aspirasi, harapan, saran dan masukan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan terutama pada sektor-sektor pelayanan publik.

Namun, sampai pada tahun 2020 dan perencanaan program/kegiatan tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis tidak/belum terdapat usulan program/kegiatan baik berasal dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi, LSM maupun lembaga/institusi lainnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2021 adalah:

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tahun 2021 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2021. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Tema yang diangkat adalah "mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat". Pencapaian sasaran tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah.

RKP 2021 mengambil tema “**Pemantapan Pembangunan yang Berkualitas dan Berdaya Saing**”.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan ada lima prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan; infrastruktur dan pemerataan wilayah; nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja; ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan stabilitas pertahanan dan keamanan. Semua prioritas nasional selanjutnya diterjemahkan ke dalam sejumlah program prioritas dan kemudian didetailkan lebih lanjut dalam beberapa kegiatan prioritas. RKP 2021 disusun pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2021-2024. Dengan demikian RKP 2021 merupakan RKP transisi yang menjembatani RPJMN 2015-2019 dengan RPJMN 2021-2024.

Arah kebijakan makro tahun 2021 secara rinci sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Potensial Indonesia, dengan cara:
 - a. Transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan melalui revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, hilirisasi pertambangan dan transformasi sektor jasa;
 - b. Penguatan permintaan domestik dan peningkatan kinerja perdagangan internasional melalui mendorong investasi sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas eksternal dan menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian.
2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi dengan cara menjaga stabilitas harga, eksternal dan sektor keuangan;
3. Memastikan Inklusivitas dan Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi, dengan cara mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, Memperluas akses dan kesempatan, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tidak berkaitan secara nyata namun dapat dipahami bahwa tugas dan fungsinya di Bidang penyebaran dan keterbukaan informasi, pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, pemanfaatan data yang akurat dan pengamanan informasi pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan lima sasaran prioritas nasional tersebut.

RKP Kabupaten Bengkalis tahun 2021 adalah RKP tahun kelima pelaksanaan RPJMD periode 2016-2021 dengan tema pembangunan **“Pemantapan Pembangunan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”** dengan prioritas pembangunan diarahkan kepada: pemantapan infrastruktur pendukung empat gerbang; pemantapan pembangunan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan; pemantapan kemampuan sektor-sektor perekonomian masyarakat berbasis padat karya dan teknologi tepat guna; pemantapan ketahanan dan kemandirian masyarakat perdesaan; dan penyiapan pemilihan daerah yang aman, tertib dan rendah konflik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2021 bagi setiap bidang di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkalis;
2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksana program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

Adapun sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 adalah:

1. Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi publik;
2. Meningkatnya layanan pengaduan masyarakat melalui LAPOR! SP4N;
3. Terpenuhinya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah dan pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);

4. Meningkatnya penerapan e-Government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pendukung e-Government dan Smart City;
6. Meningkatnya Statistik Sektor PD yang berkualitas dan terintegrasi;
7. Meningkatnya pengamanan informasi Pemerintah Daerah melalui fasilitasi penyelenggaraan persandian; dan
8. Meningkatnya pengelolaan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan kinerja Sumber Daya Manusia dan PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Visi dan Misi Perangkat Daerah yang dijabarkan di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) ke dalam program/kegiatan. Renja-PD ini disusun dengan berpedoman pada kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, layanan utama, fungsi dasar yang mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain bertujuan untuk mendukung dan mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD. Pelaksanaan program/kegiatan di dalam Renja-PD juga bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mendukung pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, pengentasan kemiskinan dan sebagainya.

Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 terdiri dari 9 program dan 45 kegiatan. Adapun rincian program/kegiatan tersebut adalah:

Program/kegiatan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Bengkalis Tahun 2021:

Non Urusan:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran: 13 kegiatan
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur: 8 kegiatan
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur: 2 kegiatan
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan: 2 kegiatan

Urusan Komunikasi dan Informatika:

5. Program Pengembangan komunikasi informasi dan media massa: 7 kegiatan
6. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi::
6 kegiatan
7. Program Kerjasama informasi dan media massa: 3 kegiatan
Urusan Statistik:
8. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah: 1 kegiatan
Urusan Persandian:
9. Program penyelenggara persandian untuk pengamanan informasi di
Pemerintah Daerah: 3 kegiatan

Kelompok sasaran program/kegiatan yang terdapat pada masing-masing program/kegiatan yang tertuang didalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, target, dan indikator kinerja. Kelompok/kawasan sasaran yang terdapat pada program/kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dilihat dari tugas dan fungsinya lebih cenderung kepada kelompok masyarakat, layanan publik, dan Perangkat Daerah. Sedangkan kebutuhan pagu anggaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 tahun 2021 sebagaimana yang terdapat pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2021 adalah sebesar Rp27.049.059.100,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp5.600.000.000,- dan Belanja Langsung (BL) Rp21.449.059.100,-

Adapun rincian rencana kegiatan per program serta indikator kinerja Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 4.1.

BAB IV

RENJA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai Perangkat Daerah (PD) yang baru terbentuk pada tahun 2017, sesuai dengan penyelenggaraan urusan dan sub urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, layanan utama, tugas dan fungsinya di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terus berupaya meningkatkan pelayanan publik terkait dengan layanan informasi, informatika, ketersediaan statistik sektoral dan pengamanan informasi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2021 masih mengarah pada kebijakan untuk meningkatkan layanan informasi baik layanan informasi publik, permintaan informasi maupun pengaduan masyarakat melalui media online LAPOR! SP4N dalam upaya Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Selanjutnya arah kebijakan untuk meningkatkan infrastruktur perangkat jaringan, internet dan pengembangan aplikasi atau sistem informasi untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penerapan *e-Government* untuk menuju Smart City, meningkatkan ketersediaan statistik sektoral terintegrasi untuk mendukung Satu Data Kabupaten Bengkalis dalam kerangka Satu Data Indonesia serta meningkatkan pengamanan informasi melalui fasilitasi penyelenggaraan persandian. Renja PD dan pendanaannya dapat dilihat pada Tabel. 4.1.

TABEL. 4.1.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kabutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				5.600.000.000,00			
	- Belanja Pegawai		Kab. Bengkalis	1 tahun	5.600.000.000,00		1 tahun	6.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG					5.600.000.000,00			6.000.000.000,00
	BELANJA LANGSUNG				21.106.327.100,00			18.876.151.300,00
	NON URUSAN				9.840.244.000,00			7.378.410.300,00
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi umum dan kepegawaian	Kab. Bengkalis	100%	2.150.790.000,00		100%	2.103.609.300,00
10	01	01						
10	01	01	001	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase surat menyurat yang di layani selama setahun	Kab. Bengkalis	100%	10.000.000,00
10	01	01	002	2. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan listrik	Persentase terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik kantor	Kab. Bengkalis	100%	190.000.000,00
10	01	01	006	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase kendaraan dinas yang memiliki izin	Kab. Bengkalis	100%	20.000.000,00

10	01	01	008	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Persentase terpenuhinya tenaga kebersihan kantor yang dibutuhkan	Kab. Bengkalis	100%	137.335.000,00	100%	137.335.000,00
10	01	01	010	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kab. Bengkalis	100%	175.000.000,00	100%	175.000.000,00
10	01	01	011	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Bengkalis	100%	47.720.000,00	100%	47.720.000,00
10	01	01	012	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penerangan kantor selama setahun	Kab. Bengkalis	100%	20.335.000,00	100%	20.335.000,00
10	01	01	017	8. Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat/kegiatan kantor	Kab. Bengkalis	100%	85.000.000,00	100%	85.000.000,00
10	01	01	018	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Bengkalis	100%	1.100.000.000,00	100%	1.100.000.000,00
10	01	01	019	10. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Persentase terpenuhinya tenaga keamanan kantor yang dibutuhkan	Kab. Bengkalis	100%	142.200.000,00	100%	142.200.000,00
10	01	01	033	11. Penyediaan Jasa Sopir kantor	Persentase terpenuhinya jasa supir kantor	Kab. Bengkalis	100%	38.400.000,00	100%	38.400.000,00
10	01	01	120	12. Penyediaan jasa tenaga administrasi	Persentase terpenuhinya jasa tenaga administrasi kantor	Kab. Bengkalis	100%	184.800.000,00	100%	184.800.000,00
10	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dikelola baik	Kab. Bengkalis	100%	6.751.736.000,00	100%	4.435.338.000
10	01	02	005	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor	Kab. Bengkalis	21 unit	2.110.000.000,00	-	0,00
10	01	02	007	2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya perlengkapan gedung kantor	Kab. Bengkalis	2 item	139.620.000,00	2 item	149.393.000,00
10	01	02	009	3 Pengadaan peralatan gedung kantor	Meningkatnya peralatan gedung kantor	Kab. Bengkalis	10 item	540.700.000,00	10 item	578.549.000,00
10	01	02	010	4 Pengadaan meubeler	Meningkatnya meubeler kantor	Kab. Bengkalis	2 item	117.240.000,00	2 item	125.446.000,00
10	01	02	022	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Bengkalis	4 unit	871.620.000,00	4 unit	670.000.000,00
10	01	02	024	6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Kab. Bengkalis	6 unit	235.000.000,00	6 unit	251.450.000,00
10	01	02	028	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan/aset gedung kantor	Kab. Bengkalis	7 item	150.000.000,00	7 item	160.500.000,00

10	01	02	277	8	Peningkatan Sarana dan Prasarana e-Government dan Smart City	Meningkatnya jumlah perangkat peralatan e-GOV dan Smart City	Kab. Bengkulu	12 item	2.587.556.000,00		12 item	800.000.000,00
10	01	05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas aparatur peserta bimtek di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian		100%	585.000.000,00		100%	611.250.000,00
10	01	05	126	1.	Pendidikan dan pelatihan formal/informal	Cakupan aparatur peserta diklat yang meningkat pemahamannya	Kab. Bengkulu	20 orang	375.000.000,00		20 orang	401.250.000,00
10	01	05	155	2.	Bimbingan teknis Teknologi Informasi dan komunikasi	Jumlah modul bimbingan teknis TIK yang diikuti	Kab. Bengkulu	3 modul	210.000.000,00		3 modul	210.000.000,00
10	01	06			Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Predikat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	B	352.718.000,00		BB	228.213.000,00
10	01	06	027	1.	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan Perangkat Daerah	Capaian predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	B	166.016.000,00		BB	177.637.000,00
10	01	06	070	2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Persentase aset yang tercatat dan dilaporkan status assetnya	Kab. Bengkulu	100%	47.268.000,00		100%	50.576.000,00
10	01	06	070	2	Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	Persentase dokumen Renstra yang tersusun	Kab. Bengkulu	100%	139.434.000,00		-	0,00
1	02	1			URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.553.817.000,00			10.737.249.000,00
10	01	15			Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Capaian Indeks PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia)		2,8	5.022.120.000,00		3,4	4.820.831.000,00
10	01	15	023	1	Publikasi media Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu	Jumlah media informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasi	Kab. Bengkulu	3 item	495.450.000,00		2 item	530.131.000,00
10	01	15	030	2	Penyediaan langganan jasa internet	Rata-rata kecepatan transfer data internet	Kab. Bengkulu	1 GBPS	3.000.000.000,00		1 GBPS	3.210.000.000,00

10	01	15	031	3	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan internet	Persentase perangkat jaringan internet yang berfungsi baik	Kab. Bengkulu	100%	600.000.000,00	100%	642.000.000,00
10	01	15	050	4	Pengelolaan Media Center	Jumlah informasi publik/kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dipublikasi	Kab. Bengkulu	1000 informasi	215.418.000,00	1000 informasi	267.500.000,00
10	01	15	xxx	5	Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	Persentase menara telekomunikasi yang memenuhi standar operasi	Kab. Bengkulu	100%	160.000.000,00	100%	171.200.000,00
10	01	15	xxx	6	Pengembangan dan pembuatan aplikasi	Jumlah aplikasi/sistem informasi yang dikembangkan	Kab. Bengkulu	2 aplikasi	261.920.000,00	2 aplikasi	280.254.400,00
10	01	15	xxx	7	Pembuatan dan Penayangan Profil Pembangunan Daerah	Jumlah profil pembangunan daerah yang didokumentasikan	Kab. Bengkulu	2 profil	254.750.000,00	2 profil	272.582.500,00
10	01	17			Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bengkulu	Kab. Bengkulu	90	2.424.297.000,00	95	2.591.500.000,00
10	01	17	005	1	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Jumlah peserta sosialisasi KIP yang meningkat pemahamannya tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kab. Bengkulu	525 orang	577.534.000,00	525 orang	617.000.000,00
10	01	17	007	2	Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) SP4N	Persentase pengaduan online melalui LAPOR! SP4N yang ditanggapi Badan Publik	Kab. Bengkulu	100%	593.902.000,00	100%	635.500.000,00
10	01	17	008	3	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kab. Bengkulu	6 kecamatan	219.790.000,00	11 kecamatan	235.000.000,00
10	01	17	011	4	Rapat Koordinasi Teknis Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Rakortek BAKOHUMAS/ Komunitas Tingkat Nasional yang diikuti	Kab. Bengkulu	1 kali	151.440.000,00	1 kali	162.000.000,00
10	01	17	xxx	5	Pelaksanaan Diseminasi dan Distribusi Informasi Pemerintah	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Diseminasi dan Distribusi Informasi Nasional	Kab. Bengkulu	100%	150.262.000,00	100%	160.000.000,00
10	01	17	006	6	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah	Persentase permintaan informasi dan dokumentasi yang ditindaklanjuti PPID Utama ke Badan Publik	Kab. Bengkulu	100%	731.369.000,00	100%	782.000.000,00

10	01	18		Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Persentase Cakupan Mass Media yang melakukan kerjasama	Kab. Bengkulu	100%	3.107.400.000,00		100%	3.324.918.000,00
10	01	18	001	1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kecamatan yang menjadi lokasi penyebarluasan informasi melalui media luar ruang	Kab. Bengkulu	11 Kecamatan	208.000.000,00		11 Kecamatan	222.560.000,00
10	01	18	007	2. Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	Jumlah peliputan dan pendokumentasian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilakukan	Kab. Bengkulu	70 kali	504.400.000,00		70 kali	539.708.000,00
10	01	18	008	3. Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Pemerintahan pada Media Massa	Jumlah mass media yang melakukan kerjasama publikasi advetorial kebijakan dan kegiatan Pemerintah	Kab. Bengkulu	100 media	2.395.000.000,00		100 media	2.562.650.000,00
1	02	14		URUSAN STATISTIK				357.770.000,00			383.000.000,00
10	01	15		Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase PD dengan Statistik Sektoral berkualitas dan terintegrasi pada Portal Data	Kab. Bengkulu	75%	357.770.000,00			383.000.000,00
10	01	15	012	1. Sinkronisasi dan Integrasi Data Statistik dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan statistik sektoral berkualitas dan terintegrasi pada portal data	Kab. Bengkulu	75%	357.770.000,00		100%	383.000.000,00
1	02	15		URUSAN PERSANDIAN				354.496.100,00			377.492.000,00
10	01	15		Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah	Jumlah maksimal kejadian penerobosan pengamanan informasi Pemerintah Daerah dalam setahun	Kab. Bengkulu	1	354.496.100,00			377.492.000,00
10	01	15	001	1. Pengelolaan Sumber Daya Persandian di Pemerintah Daerah	Jumlah aparatur yang difasilitasi sebagai peserta diklat teknis Persandian	Kab. Bengkulu	1 orang	68.928.500,00		1 orang	80.925.000,00
10	01	15	003	2. Koordinasi/konsultasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	100%	186.312.000,00		100%	196.312.000,00
10	01	15	007	3. Penyelenggaraan kontra penginderaan untuk pengamanan informasi pimpinan di Pemerintah Daerah	Jumlah lokasi strategis yang di fasilitasi pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian	Kab. Bengkulu	1 lokasi	99.255.600,00		1 lokasi	100.255.000,00

BAB V

PENUTUP

5.1. Penutup

Demikian Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 ini dibuat untuk menjadi pedoman di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada Tahun 2021.

Bengkalis, Januari 2020



**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STSTISTIK
KABUPATEN BENGKALIS**

Drs. JOHANSYAH SYAFRI
Pembina Tk I
NIP. 19680411 199303 1 009